
ABDI MASYARAKAT

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

E-ISSN: 3109-3272

e-mail: abdimasyarakat@gmail.com

PENDAMPINGAN MANAJEMEN MADRASAH DI MTS NURUL HUDA SINGOSARI MALANG

Mahrus

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia

Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang; 65152; Jawa Timur; Indonesia

e-mail: mahrus283@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan mutu pendidikan di MTs Nurul Huda Singosari melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Program pendampingan dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan madrasah yang baru berdiri agar mampu bersaing dan mandiri dalam mengelola lembaga pendidikan. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini meliputi observasi, wawancara, ceramah, diskusi, dan pendekatan *Project Based Learning* yang dilaksanakan secara berkala dari April hingga Juli 2023. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam gaya kepemimpinan kepala madrasah yang lebih demokratis, terbentuknya tim kerja profesional, serta perubahan metode pengajaran menuju model pembelajaran aktif dan partisipatif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan komite madrasah dalam pengambilan keputusan pendidikan juga mengalami peningkatan. Pendampingan ini menunjukkan bahwa penerapan MBS yang konsisten dapat mendorong otonomi lembaga, akuntabilitas, dan efektivitas layanan pendidikan, sekaligus memperkuat sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat.

Kata kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, pendampingan manajemen, madrasah, partisipasi masyarakat, pendidikan

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat mewujudkan sekolah yang efektif adalah melakukan perubahan di sekolah dengan *school based management* (SBM), yang menekankan pada pengembangan perencanaan sekolah, peningkatan kualitas sekolah, implementasi kurikulum/program baru dan aplikasi teknologi

informasi dalam pendidikan.¹ Menurut Cheng (2001)² semua negara di dunia yang menerapkan SBM sebagai cara reformasi sekolah menekankan pada desentralisasi sekolah, mengembangkan pengambilan keputusan yang efektif, mengembangkana proses internal, dan menggunakan sumber-sumber belajar dan mengajar.

Di Australia pada tahun 1992, telah diterapkan SBM sebagai kerangka sekolah masa depan (Schools of the Future/SOF), yang secara efektif dilaksanakan pada tahun 1993. Antara lain: keterlibatan semua elemen, penggunaan keuangan sekolah secara fleksibel, alokasi dana pendidikan berdasarkan kebutuhan sekolah, dan adanya keterlibatan masyarakat (termasuk orang tua) melalui dewan sekolah. Lebih lanjut pada tahun 1999 pemerintah pusat di Australia meloggarkan kebijakan dan mereformasi pendidikan dalam rangka mensukseskan program the School of the Future Framework.³

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia dirintis oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), beserta pemerintah daerah, dengan bantuan dari The United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Educational Scientific and 498 Cultural Organization (UNESCO), sejak Tahun 1999 di 7 kabupaten pada 4 provinsi. Setelah dinyatakan berhasil pada beberapa sekolah piloting, program MBS memperoleh dukungan pendanaan dari dalam dan luar negeri, antara lain NZAID, AUSAID, USAID, Plan International, Citibank, Savethe Children, Jica, dan Kartika Soekarno Foundation. Implementasi MBS di Indonesia sejak tahun 1999 diprioritaskan pada 3 pilar yaitu manajemen, Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan landasan yuridis khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pelaksanaan MBS dikembangkan menjadi 7 komponen, yaitu: kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannyasarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah.

Dasar hukum lainnya yang melandari implementasi MBS di Indonresia antara lain Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal 51 Ayat (1) dinyatakan bahwa: "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip

¹ Caldwell, B. J., & Spinks, J. M., *Self-Managing Schools: The Future of School Governance*. (London: The Falmer Press, 1992, 1998). Lihat pula: Stringfield, S., Ross, S., & Smith, L., *Bold plans for school restructuring*, (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1997)

² Cheng, Y. C., "Education Reforms in the Asia-Pacific Region: Trends and Implications". Dalam: *International Review of Education*, 47(6), (2001), hlm: 597-615.

³ Connors, R., *Self Injury: Psychotherapy with People Who Engage in Self-Inflicted Violence*. (Jason Aronson, Northvale, 2000)

manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan juga dinyatakan bahwa: “Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 49 (1) disebutkan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.”⁴ Atas dasar peraturan perundangan tersebut, maka MBS di Indonesia dibina secara terus menerus implementasinya oleh pemerintah dan pihak lain yang kompeten. MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan (Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Esensi MBS adalah pemberian otonomi sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah.⁵

Otonomi sekolah juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan yang lebih mandiri pada sekolah yang mengandung makna swakarsa, swakarya, swadana, swakelola, dan swasembada.⁶ MBS juga dapat didefinisikan sebagai pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah, dengan mengikutsertakan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan, untuk mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah.

MBS bertujuan meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah.⁷

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis berinisiatif melakukan pendampingan manajemen madrasah di MTs Nurul Huda singosari, dengan tujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Secara umum, tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁶ Buku I Panduan Pembinaan dan Pengembangan MBS Tahun 2012. Lihat pula: Panduan Pembinaan MBS Tahun 2013

⁷ Ibid.

kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Adapun tujuan MBS di MTs Nurul Huda dapat dikategorikan menjadi tiga poin utama, yaitu:

1. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite/majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah.
2. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite/majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat.
3. Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah

Kemajuan sekolah/Madrasah kerap terhambat lantaran kegagalan pengelolaan. Kepala sekolah/Madrasah dituntut terus meningkatkan kapasitas manajemennya, khususnya dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) secara penuh komitmen, konsisten, dan konsekuen. Semangat inti MBS adalah otonomi, sehingga penerapan MBS menuntut kepemimpinan kepala sekolah Madrasah yang kuat dan berorientasi pada pembelajaran. Maka, Kepala seharusnya mempunyai komitmen dan kapasitas pembelajaran yang baik sebagai pengarah dan pengelola pembelajaran. Demikian dikatakan oleh Erna Irnawati, koordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, saat membuka pelatihan untuk pelatih (TOT) manajemen berbasis sekolah di Swiss-Belhotel Cirebon, Jumat (25/3).

Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Dalam konteks kali ini ditugaskan sebagai pendamping bukan pemecah masalah. Sehingga pemilihan dampingan adalah membantu para pengelola sekolah dan juga dewan guru membuat program, melaksanakan program dan mengevaluasi program secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian dari Hamengkubuwono, Eli Susanti (IAIN Curup) bahwa dalam implementasi MBS didapat beberapa kendala, yaitu, tenaga pengajar dan kependidikan sudah melaksanakan tugasnya, namun pelaksanaannya masih belum optimal terutama pada bidang kurikulum dan program pengajaran, manajemen kesiswaan telah dilakukan tetapi cenderung kurang optimal, manajemen keuangan dan pembiayaan telah dilakukan namun kondisi keuangan masih minim, peningkatan sarana dan prasarana telah dilakukan tetapi belum dapat menunjang prestasi belajar siswa, dan sudah ada hubungan manajemen sekolah dan masyarakat tetapi komunikasi yang terjalin belum sesuai dengan harapan.

Penelitian ini dilakukan di MTs Nurul Huda Singosari Malang dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Letak Geografis

MTs Nurul Huda berada di lingkungan pondok pesantren Nurul Huda Singosari. Alamat Jl Keramat No 71 Pagentan Singosari Malang.

2. Kondisi pendidikan

Lingkungan MTs Nurul Huda berdekatan dengan Yayasan Al Ma'arif Singosari, yang notabene lembaga pendidikan sudah berdiri sejak lama dan sudah memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar pada pendidikan. Sedangkan MTs Nurul Huda merupakan lembaga madrasah yang baru berdiri sehingga memerlukan pendampingan dalam mengelola manajemen madrasah demi bisa bersaing dengan lembaga-lembaga di kab Malang, serta bisa mencapai tujuan visi misi madrasah yang sudah dirumuskan.

Bagi sebagian madrasah, menjadi madrasah yang cukup lama untuk bisa berkembang dianggap sebagai suatu masalah. Peran pengelola memang menjadi suatu yang amat penting dan strategis bagi perkembangan lembaga pendidikan. Tidak saja bagi madrasah yang baru berdiri tapi bagi madrasah yang sudah lama berdiri menjadi keharusan dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Pendampingan yang dilakukan ini berusaha untuk membantu para guru agar menemukan dan mengembangkan lembaga kearah yang lebih baik, sehingga mereka dapat menjalankan perannya sebagai guru dan lembaga pendidikan. Secara pendampingan manajemen madrasah ini dilakukan dengan proses pelatihan yang dilakukan secara bertahap. Pelatihan Laporan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2023

Pendampingan manajemen madrasah ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) membantu lembaga untuk mencapai tujuan dengan melakukan hal yang berguna; 2) membantu kepala madrasah/guru/tendik untuk bisa menjalankan manajemen sesuai tupoksinya; 3) membantu lembaga sekolah untuk meningkatkan kualitas lembaga yang lebih baik; 4) membantu pengelola/guru untuk meningkatkan cara berfikir dan bertindak positif; dan 5) membantu lembaga untuk mengembangkan lembaganya

B. METODE PENDAMPINGAN

Ada beberapa strategi yang digunakan dalam pendampingan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Nurul Huda Singosari. Strategi yang dimaksud adalah metode yang digunakan dalam semua proses kegiatan, mulai dari pencarian informasi awal tentang obyek dampingan, kegiatan pelatihan, sampai pada perumusan rencana tindak lanjut dari kegiatan ini. Adapun strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode observasi dan wawancara. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data awal tentang kondisi obyek (guru/ pengelola di MTs Nurul Huda). Selain itu, metode ini digunakan juga untuk melihat perubahan obyek dampingan setelah diberikan pendampingan berupa Manajemen Berbasis Sekolah. Metode wawancara yang dilakukan pada waktu setelah pemberian dampingan dilakukan untuk mengetahui pemahaman dari obyek dampingan tentang manajemen berbasis sekolah.
2. Metode Ceramah. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya pemberian pemahaman tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta sebagai salah satu upaya untuk mengenali diri dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola lembaga berbasis MBS. Setelah kegiatan ceramah dilakukan tanya jawab atau diskusi antara pemateri dengan peserta. Selain itu juga dilakukan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mempraktikkan materi yang telah disampaikan
3. Diskusi dan Tanya Jawab. Metode tanya jawab dan diskusi dilakukan dengan harapan ada komunikasi yang mendalam terkait materi MBS yang terdiri dari Manajemen Kepemimpinan, SDM, Humas, Pembiayaan, Admnistrasi perkantoran, Kurikulum, Sarana dan prasarana, Strategik, dan Pemasaran Pendidikan. Yang kemudian bisa diimplementasikan pada lembaga di MTs Nurul Huda Singosari.
4. Project Based Learning. Metode Project Based Learning dilakukan dengan harapan para dampingan mampu mengeksplorasi, menilai, interpretasi, sintesis dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk perencanaan madrasah, perangkat pembelajaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tercapainya tujuan visi dan misi madrasah

Sebelum pengajuan proposal pendampingan kepada ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang, dilakukan observasi dan penelitian awal lokasi pendampingan. Melakukan penelitian awal sebelum menentukan lokasi pendampingan ditujukan agar sebelum proposal diajukan sudah diketahui kondisi real dari lokasi dampingan, penelitian awal ini dilakukan dengan cara yang sederhana menggunakan observasi dan wawancara kepada kepala madrasah, wali siswa dan para warga sekitar madrasah..

Pada tahapan berikutnya dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan kepala madrasah MTs Nurul Huda Singosari, membicarakan bentuk dampingan yang sesuai dengan kondisi real dan metode capaian tujuan yang diharapkan oleh MTs Nurul Huda Singosari Malang. Sesuai dengan kondisi madrasah yang baru berdiri maka disepakati pendampingan Manajemen Madrasah berbasis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Setelah kesepakatan sudah terjalin selanjutnya pelaksanaan pendampingan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati

Kegiatan pendampingan manajemen berbasis sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Singosari Berdasarkan Undang Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal 51 Ayat (1) dinyatakan bahwa: "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah". Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan juga dinyatakan bahwa: "Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku.

Fleksibilitas yang dimaksudkan antara lain berupa keluwesan untuk mengelola, memanfaatkan, serta memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin. Dengan demikian, diharapkan pihak sekolah dapat bergerak lebih dinamis, responsif, dan inovatif dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi.

Implementasi MBS antara lain bertujuan untuk meningkatkan, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab kepala satuan pendidikan, meningkatkan kompetisi sehat antar satuan pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah. Terdapat 5 (lima) prinsip pelaksanaan MBS antara lain:

1. Kemandirian

Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara seperti mengembangkan unit-unit usaha sekolah, membangun kerja sama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan pendanaan dan peningkatan program sekolah.

2. Kemitraan

Prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan sekolah sesuai kategori sekolah. Pastikan kemitraan yang terjalin saling menguntungkan dan bersifat sejajar.

3. Partisipasi

Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi MBS antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Tujuan utama peningkatan partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi, memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Upaya peningkatan partisipasi di satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, publikasi sekaligus transparansi terhadap pemangku kepentingan.

4. Keterbukaan

Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk membangun keterbukaan kepada publik yaitu dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan berbagai program yang akan dijalankan serta menyampaikan laporan dari setiap program yang telah berjalan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan dimana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.

C. HASIL DAN DAMPAK PENDAMPINGAN

Pada bagian ini ada dua pokok bahasan yang dikaji yaitu a) Dampak perubahan, dan b) Diskusi keilmuan terkait dari pelaksanaan pendampingan Manajemen Berbasis Sekolah pada guru di MTs Nurul Huda Singosari Malang.

Teori MBS menyarankan untuk memberikan sekolah dan pemangku kepentingan kelonggaran untuk mengalokasi anggaran mereka dan memilih staf, kurikulum dan metode pengajaran di ruang kelas dapat mendorong tercapainya hasil antara, (antara lain lingkungan belajar yang lebih baik bagi

siswa dan staf, serta inovasi pengajaran dan program akademis yang lebih cocok bagi siswa setempat).

Selanjutnya, kombinasi berbagai perubahan tersebut diharapkan dapat tercermin dalam prestasi siswa yang meningkat. Mengenai dampak nyata MBS terhadap perubahan yang telah dijalankan sekolah dalam dua tahun kedepan, responden terbagi dua, antara mereka yang melaporkan perubahan memang terjadi dan mereka yang berpendapat hanya sedikit terjadi perubahan.

Dampak perubahan yang diharapkan dari pendampingan di MTs Nurul Huda Singosari adalah terjadinya Perubahan positif yang dihasilkan dari pelaksanaan pendampingan yaitu :

1. Kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah MTs Nurul Huda singosari lebih berkembang dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan profesional.
2. Terbentuknya team work MTs Nurul Huda singosari yang profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang menyeluruh
3. Setelah mengimplementasikan MBS secara benar dan konsisten, dapat meningkatkan mutu anak secara signifikan karena keterlibatan masyarakat dan orang tua serta peranannya masing-masing,
4. Perubahan metode pengajaran. Para guru mengatakan beragam perubahan yang mereka lakukan terhadap metode pengajaran, antara lain bergeser dari berceramah menjadi mengajak siswa belajar aktif, menggunakan pengelompokan siswa, menghubungkan muatan pelajaran dengan pengalaman praktis siswa dan membawa lebih banyak variasi ke dalam metode pengajaran mereka. Sebagian perubahan ini berhubungan dengan peningkatan motivasi.

Secara sederhana bisa dikatakan bahwa MBS berarti desentralisasi pendidikan. Artinya, memindahkan pengambilan keputusan itu di level sekolah. Hal ini sangat penting diperhatikan karena keputusan itu harus selalu terkait konteks (dinamika lapangan), waktu (momen yang tepat), dan perhitungan langsung mengenai dampaknya, untung ruginya. Seorang pemimpin yang sangat jago dan berprestasi sekalipun, bisa mengambil keputusan keliru kalau tidak melihat hal-hal tersebut (koneksi, waktu, dan dampak). Itulah sebabnya pemimpin itu harus laudekat dan terlibat.

Otoritas yang dimaksud bisa saja merupakan otoritas Kepala Sekolah. Sangat penting menghargai otoritas Kepala Sekolah agar dia bisa berdaya dan memberdayakan unit kerjanya. Dengan itu dia bisa berkreasi dan mengambil tanggung jawab untuk setiap langkahnya. Jangan meminta tanggung jawab Kepsek kalau dia tidak diberi otoritas.

Otoritas guru terkait dengan sejumlah hal yang diturunkan oleh Kepala Sekolah. Guru adalah manajer untuk bidangnya. Kepemimpinan guru yang lemah bisa berdampak sangat luas terhadap perkembangan peserta didik dan jalannya

sekolah. Guru menjalankan otoritas yang diberikan Kepala Sekolah karena terkait dengan hal yang sama di atas, yakni konteks, momen yang pas, dan dampak langsung. Guru perlu menggunakan otoritasnya dengan maksimal.

MBS juga berbicara mengenai otoritas masyarakat, yakni upaya sekolah untuk melibatkan anggota-anggota tertentu dari masyarakat agar terlibat aktif dalam pengambilan keputusan sekolah. Otoritas masyarakat terwujud dengan adanya Komite Sekolah, yakni sejumlah wakil masyarakat, entah itu orangtua, Dinas Pendidikan, alumni, tokoh masyarakat, atau ahli, didorong untuk menjadi bagian dari Komite Sekolah itu.

Keseimbangan terutama antara sekolah (Kepsek dan Guru) serta masyarakat sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa MBS berjalan dengan lancar, ada check and balance serta dikerjakan dengan transparan dan semuanya demi kemajuan pendidikan dan demi anak didik.

Keuntungan MBS memberi keuntungan dalam aspek: ekonomi, profesional, politis, administrasi yang efektif, keuntungan finansial, prestasi siswa, akuntabilitas, dan efektivitas Sekolah.

Pertama, Keuntungan ekonomi diperoleh sekolah ketika memahami logika berikut: MBS mempercayai sekolah sebagai pengambil keputusan. Sekolah seharusnya menjadi pihak yang paling memahami situasi dan kondisi, kebutuhan, dan langkah taktis lembaganya, karena mereka memiliki data lengkap. Keputusan yang harus diambil terkait dengan pengembangan sekolah dan bagaimana siswa akan diarahkan. Mereka yang paling bisa mengambil keputusan yang paling mengena. Keputusan yang berbasis sekolah makin mampu melayani dan makin bisa menangkap aspirasi siswa dan guru. Keputusan itu seharusnya efektif dan efisien sehingga berbiaya murah dan memberi dampak signifikan. Itulah keuntungan ekonomi yang didapat.

Kedua, aspek profesional. MBS memungkinkan keputusan diambil berdasarkan situasi dan kebutuhan sekolah. Itulah keputusan profesional. MBS yang melibatkan partisipasi guru menjadikan sebuah keputusan diambil secara integratif (menyangkut seluruh aspek termasuk kurikulum, pedagogi, proses, dan intake siswa). MBS yang melibatkan insan utama sekolah menjadikan mereka makin termotivasi dan makin memiliki komitmen. Betapa artinya MBS yang mendorongnya peningkatan dalam pelaksanaan profesionalisme.

Ketiga, aspek politis. MBS mengusung kepemimpinan yang partisipatif dan menjadikan situasi sekolah lebih stabil. MBS menjadikan sekolah makin mandiri dalam banyak aspek dan seharusnya tidak membebani atau menjadi beban bagi pemerintah atau lembaga tertentu. Kalau sekolah tidak stabil, biaya atau harga yang harus dibayar, atau taruhannya, terlalu besar.

Keempat, keuntungan efisiensi. MBS mendorong pengaturan sumber daya yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Sekolah paling mengetahui keadaan,

kebutuhan, dan langkah taktis yang harus diambil, termasuk terkait dengan SDM.

Kelima, aspek keuangan. MBS bisa menjadi kesempatan dan peluang bagi sekolah untuk bisa memperoleh dukungan dana lokal. MBS yang melibatkan orangtua dan insan sekitar sekolah menjadi kesempatan untuk mendorong komitmen bagi mereka untuk ambil bagian dalam macam-macam kegiatan pengembangan. MBS yang baik terbukti mendorong makin banyak donasi baik uang, tenaga, maupun resources lain.

Keenam, prestasi siswa. MBS yang melibatkan guru dan orangtua dalam pengambilan keputusan, bisa menciptakan iklim kerja yang mendorong prestasi siswa. Guru dan siswa akan makin termotivasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar karena memiliki otoritas dalam melangkah dan kesempatan berkreasi.

Ketujuh, akuntabilitas. Melibatkan guru, orangtua dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan pelaporan dapat mendorong support mereka untuk makin termotivasi dalam melakukan perbaikan sekolah. Orang-orang tersebut makin termotivasi karena merasakan bahwa suara mereka didengarkan. Langkah itu bisa menciptakan efisiensi biaya dan menurunkan beban biaya.

Kedelapan, MBS menjadikan sekolah makin efektif. Sekolah menjadi makin efektif karena empat hal: (a) Kepemimpinan makin kuat. MBS mendorong pemimpin sekolah dipilih menggunakan kriteria transparan. Rencana perbaikan sekolah dikembangkan sesuai konteks lokal. Resources sungguh digunakan untuk sekolah. (b) guru makin kompeten dan berkarakter. Sekolah punya otoritas untuk membuat perubahan kurikulum dan metodenya. Guru bertanggung jawab penuh dalam rencana pengembangan sekolah. Guru dievaluasi oleh pimpinan sekolah setempat. Sekolah punya otoritas untuk menentukan training apa yang dibutuhkan guru. Hal-hal itulah yang memperkuat guru. (c) Fokus dalam pembelajaran makin meningkat. Fokus sekolah makin baik karena sesuai konteks dan kebutuhan. Informasi terkait proses dan pembelajaran bisa makin transparan. (d) Tanggung jawab akan hasil lebih baik. MBS mendorong sekolah memikirkan pentingnya hasil dan tidak berhenti pada proses.

Semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sekolah memperhatikan aspek-aspek di atas agar MBS yang begitu menguntungkan pengembangan dan prestasi sekolah tidak ragu untuk dilaksanakan dengan maksimal.

Follow Up kegiatan pendampingan manajemen berbasis sekolah yang dilaksanakan setiap hari sabtu setiap bulan dari bulan april sampai dengan juli di MTs Nurul Huda singosari yang berupa kegiatan pengkajian kitab Nashoihul Ibad ini adalah pemaparan materi terkait manajemen berbasis sekolah (MBS)

Tujuan dari kegiatan ini antara lain a) peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, b) peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah, c) peningkatan kesejahteraan materil dan non materil, d) peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua, e) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah.

Harapannya, dengan adanya pendampingan manajemen berbasis sekolah ini, akan dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh lapisan baik kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua dan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang berupa pendampingan Manajemen Berbasis Sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan di MTs Nurul Huda Singosari pada semester genap periode april-juli, dan dilaksanakan setiap hari sabtu pekan ke 2 setiap bulan.

Kegiatan pembinaan ini bertujuan agar kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah MTs Nurul Huda singosari lebih berkembang, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, meningkatkan mutu proses pembelajaran sehingga akan menghasilkan output yang unggul, membantu masyarakat dan orang tua dalam berperan serta mengawal keberlangsungan pendidikan di MTs Nurul Huda, dan membekali dan meningkatkan kompetensi guru baik komeptensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih baik dan bermutu.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M., *Self-Managing Schools: The Future of School Governance*. (London: The Falmer Press, 1992, 1998).
- Stringfield, S., Ross, S., & Smith, L., *Bold Plans for School Restructuring*, (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1997)
- Cheng, Y. C., *Education Reforms in the Asia-Pacific Region: Trends and Implications*. *International Review of Education*, 47(6), (2001), hlm: 597–615.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002).
- Komariah, A. & Triatna, C., *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Kurniasih, I. & Sani, B.,. *Implementasi Pendekatan Saintifik, Pengetahuan Berbasis Proyek, dan Penilaian Autentik*, (Jakarta: Kata Pena, 2017)
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNESCO & UNICEF, *School-Based Management Policy and Implementation in Southeast Asia.*, (2005)

Yuwono, U. & Haris, A., *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)